

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pembahasan tentang Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang maka dapat disimpulkan bahwa dalam menindaklanjuti temuan BPK terdapat 3 indikator, yaitu :

##### **1. Penyelesaian Temuan**

Pemerintah Kota Kupang telah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil temuan BPK, dengan memberikan dokumen tindak lanjut seperti yang tertera dalam LHP. Namun dari keempat SKPD yang mendapat temuan dua diantaranya belum menyelesaikan tindak lanjut secara optimal yakni BKAD Kota Kupang dan BKPPD Kota Kupang, dimana terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi belum optimalnya tindak lanjut seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berkompeten dalam menyelesaikan tindak lanjut, perubahan struktur organisasi (mutasi), koordinasi yang belum maksimal antar SKPD, dan pihak ketiga dalam hal ini pegawai yang menerima kelebihan pembayara yang kurang responsif dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.

##### **2. Implementasi Rekomendasi**

Implementasi rekomendasi BPK oleh Pemerintah Kota Kupang menunjukkan bahwa masing-masing SKPD telah mengambil langkah-langkah perbaikan sesuai dengan temuan yang diterima, meskipun dengan tingkat efektivitas yang bervariasi. Namun, tantangan implementasi juga

masih nyata, terutama pada SKPD yang terlibat dalam pengelolaan data kepegawaian dan belanja pegawai, seperti BKAD dan BKPPD. Kedua instansi ini telah mengambil langkah melalui penguatan pengawasan internal dan pengembangan prosedur verifikasi data pegawai. BKAD, misalnya, menerapkan kebijakan pengawasan atas belanja pegawai dan melakukan pendataan rutin bersama BKPPD. Sementara itu, BKPPD mulai mengembangkan prosedur pemantauan status ASN yang pensiun atau diberhentikan. Kendati demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih dilakukan secara bertahap dan belum terintegrasi dalam sistem digital yang memadai.

### 3. Pemantauan

Beberapa dinas seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Kupang melakukan pemantauan secara internal, melalui koordinasi dengan BKAD, Inspektorat, atau audit internal berkala. Akan tetapi, pemantauan tersebut masih cenderung bersifat reaktif dan administratif, belum berbasis indikator kinerja yang terstruktur dan tidak terintegrasi ke dalam sistem pelaporan daerah secara digital. Dalam praktiknya, koordinasi antarunit belum dilengkapi dengan sistem informasi yang mampu memberikan akses data yang real-time dan menyeluruh terhadap status penyelesaian temuan BPK.

BKAD sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah telah melakukan pemantauan aktif, termasuk dalam penyusunan laporan tindak lanjut ke BPK. Namun, hasil evaluasi pemantauan tersebut belum

dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan pembenahan kebijakan atau prosedur internal yang lebih menyeluruh. Fungsi pemantauan masih terbatas pada pemenuhan kewajiban administratif tanpa mendorong refleksi kelembagaan yang mendalam. Sementara itu, BKPPD Kota Kupang memantau tindak lanjut melalui rekonsiliasi data kepegawaian secara berkala bersama BKAD.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Kupang, khususnya SKPD yang belum optimal dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan seperti BKAD dan BKPPD, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis secara berkala, khususnya terkait mekanisme penyelesaian rekomendasi BPK. Selain itu, diperlukan sistem alih tugas yang terdokumentasi secara baik agar mutasi pegawai tidak menghambat kelanjutan penyelesaian temuan.
2. Pemerintah Kota Kupang perlu mempercepat integrasi sistem kepegawaian dan sistem keuangan guna meminimalkan risiko kesalahan penginputan data. Prosedur verifikasi dan pengawasan internal yang telah disusun oleh BKAD dan BKPPD perlu diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi serta pelibatan pengawasan fungsional. Penerapan sistem yang terstandarisasi dan terdokumentasi

juga akan membantu menjaga kesinambungan implementasi meskipun terjadi pergantian personel.

3. Pemerintah Kota Kupang perlu membangun sistem pemantauan yang berbasis digital dan terintegrasi lintas SKPD, sehingga seluruh proses tindak lanjut dapat dipantau secara real-time dan akurat. Pemantauan harus dilakukan secara proaktif dengan indikator kinerja yang terukur, tidak semata-mata administratif. Evaluasi hasil pemantauan sebaiknya dijadikan dasar untuk membenahan kebijakan dan prosedur, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban pelaporan. BKAD selaku koordinator keuangan daerah juga diharapkan memperkuat fungsi pengawasan dan refleksi kelembagaan atas tindak lanjut yang telah maupun belum dilakukan oleh setiap SKPD.